



## IMPLEMENTASI KARTU PINTAR DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DESA SENGGUANG JAYA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

**Suci Astria, Suimi Fales, Dalima Septiria,**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama, Bengkulu, Indonesia

### ABSTRACT

The digital transformation of rural bureaucracy is a strategic necessity to enhance the quality of public services. This study examines the implementation of the "Smart Card" system in Sengkuang Jaya Village and analyzes it through the lens of Islamic law, specifically the Maslahah Mursalah perspective. Using a qualitative field research method, data were gathered through observations, interviews, and documentation. The results indicate that the Smart Card system has significantly improved administrative efficiency by integrating population data and accelerating service delivery times. Despite challenges such as digital literacy gaps among the elderly and limited internet infrastructure, the village government has implemented effective mitigation strategies. From an Islamic legal standpoint, this innovation is categorized as Maslahah Hajiya, as it serves the public interest (al-maslahah al-'ammah) by removing administrative difficulties and aligning with Maqasid al-Syari'ah principles, particularly in protecting property (Hifz al-Mal) and life (Hifz al-Nafs). This study concludes that the Smart Card serves as an ideal model for digital village transformation that remains grounded in human and spiritual values.

 OPEN ACCESS

### ARTICLE HISTORY

Received: 15-05-2026

Accepted: 17-06-2026

### KEYWORDS

Smart Card, Public Service, Village Bureaucracy, Maslahah Mursalah, Digital Transformation.

CONTACT: [suciastria@stiesnu-bengkulu.ac.id](mailto:suciastria@stiesnu-bengkulu.ac.id)

© 2022 The Author(s). Published by Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdatul Ulama Bengkulu. This work is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kewajiban fundamental pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi di era digital, transformasi birokrasi menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi (A Moeslihat Dkk.2024). Di tingkat pemerintahan terkecil, yakni desa, inovasi digital mulai merambah guna memangkas prosedur administratif yang selama ini dianggap kaku dan memakan waktu lama (Eddy Dkk.2024). Salah satu manifestasi dari digitalisasi ini adalah penerapan sistem "Kartu Pintar" yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai data kependudukan dan layanan sosial dalam satu akses yang praktis.

Desa Sengkuang Jaya sebagai salah satu entitas pemerintahan desa mulai mengadopsi teknologi ini sebagai upaya responsif terhadap tuntutan masyarakat akan pelayanan yang cepat dan akurat. Namun, implementasi teknologi di tingkat desa seringkali menghadapi tantangan struktural maupun kultural yang kompleks, termasuk kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukungnya. Keberadaan Kartu Pintar diharapkan tidak hanya menjadi simbol modernitas, melainkan benar-benar memberikan nilai guna yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat setempat (Nasrullah Dkk.2025). Efektivitas penggunaan kartu ini menjadi parameter penting dalam menilai sejauh mana birokrasi desa mampu beradaptasi dengan kebutuhan zaman.

Dalam kacamata hukum Islam, setiap kebijakan publik haruslah bermuara pada perlindungan terhadap kemaslahatan umat. Konsep Maslahah Mursalah hadir sebagai instrumen hukum untuk menetapkan aturan pada persoalan-persoalan baru yang tidak ditemukan dalil khususnya secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun sejalan dengan tujuan syariat (Maqasid al-Syari'ah). Penerapan Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya perlu dibedah lebih dalam untuk melihat apakah inovasi tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip kemaslahatan, yaitu mendatangkan manfaat (jalb al-manfa'ah) dan menolak kerusakan (dar'u al-mafasid) bagi warga desa secara menyeluruh (Ahmad Dkk.2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kartu Pintar dalam pelayanan publik di Desa Sengkuang Jaya serta mengevaluasinya melalui perspektif Maslahah Mursalah. Hal ini penting dilakukan guna memastikan bahwa digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa tidak hanya sekadar formalitas administratif, tetapi secara substansial mampu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat sebagaimana prinsip dasar dalam hukum Islam.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berfokus pada pengumpulan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Desa Sengkuang Jaya, mengingat desa ini merupakan pionir dalam pengimplementasian sistem Kartu Pintar di wilayah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah studi fenomenologi, yang bertujuan untuk menggali pengalaman subjek penelitian terkait efektivitas dan kendala dalam penggunaan layanan digital tersebut.

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam kepada informan kunci, seperti Kepala Desa, operator sistem, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana alur pelayanan publik berlangsung saat warga menggunakan Kartu Pintar. Untuk memperkuat analisis, data sekunder dikumpulkan melalui penelaahan dokumen resmi desa, arsip kependudukan, serta literatur terkait konsep Masalah Mursalah dalam kebijakan publik(Syamsul Dkk.2024).

Teknik penjaminan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan data observasi dan dokumen yang tersedia guna meminimalisir subjektivitas peneliti. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui tahap reduksi, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan yang kredibel. Terakhir, analisis data dilakukan dengan mengonfrontasikan temuan lapangan terhadap teori kemaslahatan untuk menarik simpulan hukum yang relevan mengenai implementasi teknologi ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perspektif Maqashid Syariah, pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat daruriyyat bagi keluarga inti, khususnya anak dan pasangan, harus ditempatkan pada prioritas. Uraian komprehensif mengenai dinamika lapangan terkait implementasi teknologi informasi pada level birokrasi pemerintahan desa dipaparkan secara mendalam. Melalui sinkronisasi antara temuan empiris di Desa Sengkuang Jaya dengan kerangka teoretis Masalah Mursalah, analisis berikut mengevaluasi efektivitas inovasi digital dalam merespons berbagai problematika pelayanan publik. Fokus utama terletak pada transformasi pola pelayanan serta derajat kemaslahatan yang dihasilkan bagi masyarakat, guna memastikan bahwa digitalisasi tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan nilai kemanusiaan sebagaimana yang dirincikan dalam poin-poin berikut:

### 1. Transformasi dan Realitas Mekanisme Kartu Pintar

Implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya merupakan respons strategis terhadap arus digitalisasi birokrasi yang menuntut efisiensi di tingkat pemerintahan paling bawah. Secara teknis, kartu ini dirancang sebagai instrumen integrasi data kependudukan yang mencakup identitas diri, status ekonomi, hingga riwayat bantuan sosial dalam satu platform elektronik berbasis chip. Berdasarkan temuan di lapangan, proses transisi dari sistem manual ke digital ini diawali dengan sinkronisasi basis data desa yang melibatkan verifikasi ulang terhadap ribuan data warga untuk memastikan tingkat akurasi yang tinggi.

Dari sisi operasional, Kartu Pintar ini berfungsi sebagai "kunci akses" bagi warga saat berurusan di Kantor Desa Sengkuang Jaya. Warga tidak lagi diwajibkan membawa tumpukan dokumen fisik seperti fotokopi Kartu Keluarga atau KTP secara berulang, melainkan cukup melakukan pemindaian (tapping) pada perangkat yang tersedia(Irlon Dkk.2026). Dampak yang paling signifikan dirasakan adalah pada kecepatan pelayanan administrasi surat-menyurat, seperti pembuatan surat keterangan usaha atau surat pengantar lainnya, yang kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari lima menit. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi bukan sekadar gaya hidup urban, melainkan kebutuhan mendesak bagi efektivitas birokrasi pedesaan.

Namun, dinamika di lapangan juga menunjukkan adanya disparitas adaptasi teknologi. Kelompok usia muda dan produktif cenderung sangat antusias karena aksesibilitas yang ditawarkan, sementara sebagian warga lanjut usia mengalami kendala psikologis dan teknis dalam memahami cara kerja kartu digital tersebut. Selain faktor literasi, tantangan infrastruktur berupa ketidakstabilan koneksi internet di wilayah geografis tertentu di Desa Sengkuang Jaya terkadang menyebabkan kegagalan sistem saat proses sinkronisasi data secara real-time. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah desa telah mengambil langkah progresif dengan membangun unit bantuan khusus (help desk) dan memperkuat pemancar sinyal di area kantor desa guna menjamin kelancaran layanan bagi masyarakat (Zainol Dkk.2025)

## 2. Analisis Implementasi dalam Perspektif Masalah Mursalah

Kajian hukum Islam memandang kebijakan publik sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Implementasi Kartu Pintar ini jika dibedah menggunakan pisau analisis Masalah Mursalah menunjukkan relevansi yang sangat kuat. Masalah Mursalah sendiri adalah kemaslahatan yang tidak diatur secara eksplisit oleh dalil nas namun sejalan dengan prinsip umum syariat dalam menjaga manfaat (Fatta Dkk.2025). Inovasi di Desa Sengkuang Jaya ini merupakan jawaban atas kebutuhan zaman yang menuntut kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan publik, yang jika diabaikan justru akan menimbulkan kesulitan (masyaqqah) bagi masyarakat.

Dalam hierarki kemaslahatan, penggunaan Kartu Pintar ini dapat dikategorikan sebagai Masalah Hajiya (kebutuhan sekunder). Artinya, tanpa kartu ini masyarakat sebenarnya masih bisa hidup, namun mereka akan mengalami kesulitan dan kerumitan birokrasi yang menghambat produktivitas ekonomi dan sosial mereka. Dengan adanya sistem ini, kesulitan-kesulitan tersebut diangkat (raf'ul haraj), sehingga masyarakat dapat mengalokasikan waktunya untuk kegiatan yang lebih produktif daripada sekadar mengantre di kantor desa. Kebijakan ini selaras dengan kaidah fikih politik bahwa tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan.

## 3. Maqasid al-Syari'ah dan Perlindungan Hak Publik

Secara lebih spesifik, implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya memberikan kontribusi nyata terhadap perlindungan lima unsur pokok dalam Maqasid al-Syari'ah. Pertama, dalam aspek Hifz al-Mal (perlindungan harta), sistem digital ini secara otomatis memutus mata rantai birokrasi yang panjang yang selama ini rentan terhadap praktik pungutan liar atau gratifikasi. Transparansi data yang ditawarkan memastikan bahwa bantuan sosial atau insentif desa terdistribusi secara tepat sasaran kepada mereka yang berhak, tanpa ada kebocoran dana akibat manipulasi data fisik (Busyro Dkk.2025).

Kedua, aspek Hifz al-Nafs (perlindungan jiwa) dan Hifz al-'Aql (perlindungan akal) tercermin dalam kemudahan akses layanan kesehatan yang terintegrasi pada kartu tersebut. Kecepatan akses data medis atau kepesertaan jaminan kesehatan di saat darurat merupakan bentuk perlindungan nyata terhadap keselamatan jiwa warga desa (Uswatun Dkk.2025). Ketiga, prinsip dar'u al-mafasid (menolak kerusakan) diaplikasikan melalui sistem keamanan data kependudukan yang terenkripsi. Pemerintah desa memastikan bahwa data pribadi warga tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab, yang merupakan bentuk upaya preventif dari kerusakan sosial akibat penyalahgunaan identitas digital.

## 4. Integrasi Etika Digital dan Kesenambungan Layanan

Keberhasilan Desa Sengkuang Jaya dalam memadukan teknologi dan nilai-nilai kemaslahatan Islam menunjukkan bahwa agama tidak menghalangi modernitas, melainkan menjadi kompas moral dalam penggunaannya. Integrasi ini menuntut adanya komitmen berkelanjutan dari pemerintah desa untuk terus melakukan pembaruan sistem dan edukasi kepada masyarakat. Keselarasan antara efisiensi administrasi digital dengan prinsip keadilan sosial merupakan kunci utama agar Kartu Pintar tidak berhenti sebagai inovasi teknis, melainkan menjadi sarana ibadah sosial bagi para pemangku kebijakan di desa (Ita Dkk.2025)

Secara substansial, implementasi ini telah memenuhi syarat-syarat Masalah Mursalah, yaitu: (1) Masalah tersebut bersifat nyata (*haqiqiyah*) dalam memberikan kemudahan, (2) Bersifat umum (*ammah*) untuk seluruh warga desa, dan (3) Tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya adalah model ideal bagaimana sebuah desa dapat bertransformasi secara digital tanpa kehilangan ruh spiritual dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelayanan publiknya.

## Kesimpulan

Implementasi Kartu Pintar di Desa Sengkuang Jaya merupakan langkah transformatif yang secara nyata mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi data yang akurat dan percepatan durasi birokrasi. Inovasi ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi di tingkat pedesaan bukan hanya sekadar modernisasi fisik, melainkan solusi teknis untuk mengatasi kerumitan administrasi konvensional yang selama ini menghambat hak-hak sipil warga. Meskipun terdapat kendala pada aspek literasi digital bagi kalangan lansia serta keterbatasan infrastruktur jaringan, upaya mitigasi yang dilakukan pemerintah desa melalui layanan bantuan khusus menunjukkan komitmen yang kuat terhadap kesinambungan program.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam, kebijakan ini memiliki legitimasi yang kokoh sebagai bentuk Masalah Mursalah karena orientasi utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Program ini memenuhi kriteria Masalah Hajiya dengan mengangkat kesulitan (*masyaqqah*) masyarakat serta mendukung prinsip *Maqasid al-Syari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*Hifz al-Mal*) melalui sistem yang transparan dan perlindungan jiwa (*Hifz al-Nafs*) melalui integrasi layanan kesehatan. Sebagai rekomendasi, penguatan edukasi teknologi secara persuasif dan peningkatan kapasitas server menjadi kunci utama agar manfaat kartu ini dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

## Daftar Pustaka

Abdul Gofar, Siti Amina, Nisrina Fajrin. "Rekonstruksi Konsep Masalah Mursalah Sebagai Basis Ijtihad Kontemporer Dalam Menjawab Tantangan Modernitas." *Tamaddun* 10, no. 1 (2025): 10–28.

Aji Tri Prayoga, Dwian Hartomi Akta Padma Eldo. "Analisis Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Digital Di Kecamatan Temanggung Kabupaten Temanggung." *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah* 6, no. 2 (2024): 291–303.

Amanda, Silvia, and Rayyan Firdaus. "Pengaruh Penerapan Smart Card Terhadap Lingkungan Masyarakat." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 3 (2024): 15918–26.

Ansumanti. "Persiapan Guru Dalam Melaksanakan Sistem Pembelajaran Merdeka Belajar Di SDN 140 Seluma Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma." *Jurnal Pendidikan Tematik* 3, no. 3 (2022): 1–6.

Astuti, Sri Widia, Muhammad Rehan, and Muhammad Afriza. "Penerapan Masalah Mursalah Dalam Transaksi Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 3 (2024): 102–7.

Dainori. "Relevansi Konsep Masalah Mursalah Terhadap Kebijakan Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia." *LITASKUNU: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2025): 13–35.

Handayani, Putri. "Reformasi Birokrasi Publik Berbasis Ekonomi Islam : Analisis Maqāṣid Syarī ' Ah Dan Qawā ' Id Fiqhiyyah Pada Pelayanan Publik Di Kecamatan Tambang." *Journal of Sharia Economics* 2, no. 2 (2025): 218–29.

Hasanah, Uswatun, and Asmuni Muhammad. "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 12, no. 2 (2025): 21–28.

Hertanto, Yudhi, Iqlima Zahari, Fatma Faisal, and Johannes Triestanto. "Kebijakan Publik Pemerintah Dalam Perspektif Masalah Dan Prinsip Negara Hukum." *Jurnal Kolaboratif Sains* 9, no. 1 (2026): 1451–61. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10233>.

Huda, Zainol. "Posisi Istihsan Dan Masalah Mursalah Dalam Ijtihad Ekonomi Syariah: Analisis Metodologis Dan Aplikasi Kontemporer." *Tashfir Terateks: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah* 1, no. 2 (2025): 106–16.

Irsyad Al Fikri Ys, Asep Fu'ad. "Peran Masalah Mursalah Dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab Dan Implikasi Kebijakan." *Equality : Journal of Islamic Law ( EJIL )* 3, no. 2 (2025): 31–46. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1936>.

Khalid Aldien, Dava Lingga Bagaskara, Wandu Imam Subakti. "Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Web Dari Perspektif Masyarakat Di Desa Cinunuk." *PENTAHHELIX: Jurnal Administrasi Publik* 2, no. 1 (2024): 1–10.

Marisa Rizki, Moh Bahrudin, Syamsul Hilal. "Metode Istinbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi." *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* 2, no. 2 (2024): 120–36.

Mohamad Steven Alim, Rizkiyanto Ibrahim. "Optimalisasi Kualitas Pelayanan Publik Di Era Digital Desa Moluo Kab. Gorontalo Utara." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 3793–3802.

Muhammad Ikhwan, Ismail, Busyro. "Mashlahah Mursalah Dan Tantangan Zaman ( Studi Konseptual Dan Implikasinya Terhadap Isu Kontemporer )." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya* 7, no. 1 (2025): 61–75.

Muliana Nursaleh, Herman Dema, Abdul Jabbar, Muhammad Rais Rahmat Razak, Mutiah Khaerunnisa. "Dampak Digitalisasi Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Desa Sipodeceng." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 9, no. 1 (2026): 407–20.

Nurindah Sari, Moh. Aris Pasigai, Nasrullah. "Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan : Studi Kasus Pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga Di Kantor Desa Borong Pa ' La ' La, Gowa." *Bongaya Journal for Research in Management* 9, no. 1 (2025): 35–49.

Nurma Harana Mora Siregar, Syawaluddin Siregar, Indra Sakti, Iqbal, and Nur Sania Dasopang Pinayungan Munthe. "Maslahah Mursalah Sebagai Dasar Kewajiban Pencatatan Perkawinan." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 6059–68.

Panna, Irlon, Montgomery Warbal, and Selvia F G Renyut. "Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Digital Desa ( DIGIDES )." *Jurnal Inovasi Manajemen Publik* 1, no. 1 (2026): 33–42.

- Rahmat Hidayat, Asmuni, Mhd. Syahnan. "Sistem Kupon Dalam Penyaluran Zakat : Tinjauan Masalah Mursalah." *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2025): 1–11.
- Rinda Anissa Qoiriya, Ahmad Junaidi. "Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Perspektif Politik Hukum Dan Masalah Mursalah." *El-Dusturie: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2025): 48–63.
- Rohaeni, N Eni, and Oyon Saryono. "Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar ( PIP ) Melalui Kartu Indonesia Pintar ( KIP ) Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan." *IJEMAR* 2, no. 1 (2018): 193–204.
- Sholathiah, Lathifah, Aimmatur Rosidah, and Taufik Rahman. "Perlindungan Hukum Dan Risiko Investasi Pada Securities Crowdfunding Syariah : Analisis Masalah Mursalah." *Al-Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah* 10, no. 2 (2025): 105–19.
- Sikumbang, Fatta Ismiyana. "Prinsip Transparansi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Nagari Tapakis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009." *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)* 3, no. 4 (2025): 171–82.
- Siti Aisyah, Eddy Suriyani. "Implementasi Program Digitalisasi Desa (DIGIDES) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Desa Kapar Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *JAPB* 7, no. 2 (2024): 2073–88.
- Takya Marell Andena, Tepi Peirisal, A Moeslihat Komara. "Implementasi Kebijakan Program Kartu Pintar (KIP) Di UPTD SDN Budayasari Desa Cikaum Timur Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang." *WPAJ* 6, no. 1 (2024): 12.
- Umam, Muhamad Khoerul. "Fungsi Pengawasan OMBUDSMAN Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Perspektif Masalah Mursalah." *Jurnal Hukum & Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 199–210.
- Yanuarto, Aldo, Aji Santoso, Lia Amelia, Ahmad Rusdie, Nur Fadillah, Ardian Ari, Muhammad Ramadhan, Kamal Hasuna, and Reza Noor Ikhsan. "Efektivitas Penerapan Smart System Dukcapil Dalam Pelayanan Administrasi Digital Di Kota Palangka Raya." *Pemberdayaan Masyarakat : Jurnal Aksi Sosial* 2, no. 4 (2025): 32–45.
- Yati, Lisa Medika. "Transparansi Pelayanan Publik Dalam UU No . 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam : Studi Kasus Nagari Tapakis , Kecamatan Ulakan Tapakis , Kabupaten Padang Pariaman." *Madania: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan Islam* 14, no. 1 (2024): 74–81.
- Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah. "Kontribusi Hukum Islam Terhadap Reformasi Birokrasi: Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Yang Efisien, Efektif, Dan Berkualitas." *Jurnal Esensi Hukum* 6, no. 1 (2024): 15–30.